

## KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

Lilis Siti Badriah<sup>1)</sup>, Herman Sambodo<sup>2)</sup>, Irma Suryahani<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

<sup>3)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

### ABSTRACT

*The purposes of this research are to analyze level of inequality income distribution and factors influencing per capita income change in Purbalingga.*

*The research method of this research is case study with descriptive analysis using secondary data include per capita income, amount of population, economic sectoral contribution to GDRP of Purbalingga, and development expenditure during 1990-2003. To analyze level of inequality income distribution it use Williamson Index Analysis method. The results of this research indicate that:*

- 1. Average of Williamson Index value during 1990-2003 is  $0.07 \approx 0.1$ .*
- 2. Simultaneously, amount of population, primary sector contribution, secondary sector contribution, tertiary sector contribution, and development expenditure have a significant effect to per capita income change. Partially, amount of population, primary sector contribution, secondary sector contribution, and tertiary sector contribution have a significant effect with regression coefficient value for each variable is 4,809, 12,007, 4,511, and 15,273. While development expenditure is not having a significant effect to per capita income change.*

*The conclusions of this research are level of inequality income distribution in Purbalingga during 1990-2003 is low inequality income distribution category, and per capita income change is influenced significantly by amount of population, primary sector contribution, secondary sector contribution, and tertiary sector contribution. The tertiary sector contribution has a biggest influence.*

**Keywords:** *inequality income distribution, per capita income change, government expenditure*

### PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian daerah selama ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui peningkatan produksi barang dan jasa (PDRB), mengindikasikan adanya ekspansi kapasitas produksi dan aktivitas perekonomian daerah. Meningkatnya aktivitas perekonomian daerah memberikan implikasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Persoalannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi daerah memiliki dimensi terhadap pemerataan? Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ternyata memberikan penekanan pada pembangunan sektoral yang relatif parsial dalam perencanaan dan penanganannya sehingga berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan yang relatif tidak terpadu dan komprehensif (Mawardi, 1997). Investasi yang dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata tidak diikuti oleh pemerataan. Efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan terjadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

ternyata tidak terjadi, akibatnya pertumbuhan cenderung diikuti ketimpangan yang tinggi pula (Myrdal, 1957).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang diolah, proses pembangunan ekonomi daerah di Jawa Tengah telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan rata-rata selama periode 1990-2003 sebesar 4,27% per tahun, dan nilai PDRB per kapita dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 3,30% per tahun. Keberhasilan pembangunan ekonomi Propinsi Jawa Tengah tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah propinsi tersebut termasuk kontribusi yang dihasilkan oleh kabupaten Purbalingga yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama tahun 1990-2003 mencapai 3.39% per tahun.

Selain mengamati pertumbuhan ekonomi kabupaten, pembangunan daerah pun dapat dikaji melalui pendapatan per kapita. Telaah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia atau ketimpangan regional (*regional gap* atau *regional disparity*) difokuskan pada

ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar daerah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Ketimpangan bisa terjadi dalam proses pembangunan daerah karena perbedaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, arus modal, kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan wilayah tertentu, dan perencanaan daerah yang kurang tepat.

Untuk mengukur kemajuan ekonomi di Kabupaten Purbalingga, salah satu indikator yang digunakan adalah pendapatan per kapita, yang secara agregat dapat menjelaskan tentang tingkat ekonomi yang dicapai masyarakat daerah tersebut.

Secara umum, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purbalingga yang diolah kembali, gambaran pendapatan per kapita kabupaten Purbalingga apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya adalah sebagai berikut: rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Cilacap selama periode 1990-2003 adalah sebesar Rp 3.876.211,37 per tahun dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 4,93% per tahun, berada di atas rata-rata laju pertumbuhan pendapatan per kapita Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,30% per tahun dalam periode yang sama, rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Banyumas selama periode tersebut adalah sebesar Rp 683.466,02 per tahun dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 1,94% per tahun, rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Purbalingga selama periode tersebut sebesar Rp 736.209,82 per tahun dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 1,40% per tahun, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar Rp 974.578,81 per tahun dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 1,33% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama tahun 1990-2003 mencapai rata-rata sebesar 3.39% per tahun dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang mencapai rata-rata sebesar 1.40% per tahun, kedua nilai rata-rata pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah.

Melihat fenomena di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan dalam pencapaian hasil pembangunan antar daerah. Perbedaan dalam pencapaian hasil pembangunan antar daerah umumnya dapat diamati berupa adanya perbedaan dalam distribusi penduduk antar daerah, perbedaan infrastruktur yang dimiliki masing-masing daerah, posisi wilayah, dan beberapa perbedaan prioritas sasaran kegiatan ekonomi. Akibatnya terjadi kesenjangan pembangunan daerah.

Perbedaan pendapatan per kapita yang menjadi kriteria ketimpangan pembangunan antar daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi masing-masing wilayah yang

tercermin pada jumlah penduduk, sumbangan sektor-sektor ekonomi baik primer, sekunder, dan tersier, yang menunjukkan perkembangan struktur ekonomi yang terjadi, dan pengeluaran pembangunan khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Masalahnya adalah, bagaimana kegiatan pembangunan dapat menstimulasikan faktor-faktor ekonomi tersebut bagi pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah.

Membandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Purbalingga dengan daerah sekitarnya, terlihat bahwa walaupun nilainya relatif lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara (1.33%), tetapi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun yang dicapai oleh Kabupaten Banyumas (1.94%) maupun Kabupaten Cilacap (4.93%). Dalam perspektif pembangunan daerah yang mengindikasikan adanya ketimpangan, maka ketimpangan tersebut perlu untuk segera diatasi agar proses pembangunan ekonomi daerah semakin berhasil guna dan berdaya guna.

### **Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan daerah merupakan usaha untuk memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa pendekatan untuk melihat kemungkinan adanya disparitas regional dalam proses pembangunan. Bahasan tentang disparitas regional selalu mengaitkan antara faktor-faktor ekonomi yang terdapat di suatu daerah terhadap kemajuan yang dicapai di suatu wilayah serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Misalnya, Myrdal (1957) mengenai backwash effect dan spread effect, Perroux mengenai teori growth poles dan Hirschman tentang terjadinya polarization effect (dalam Glasson, 1977).

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah (a) akumulasi modal, termasuk jenis investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan stok modal (capital stock), (b) pertumbuhan penduduk dan kenaikan angkatan kerja (labor force), dan (c) teknologi.

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan ekonomi yang mencakup pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi selalu mempertimbangkan pertumbuhan dan perubahan faktor-faktor ekonomi. Apabila faktor-faktor ekonomi yang dimiliki berbeda, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan corak pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan di masing-masing daerah.

Amstrong dan Taylor (1997) mengemukakan bahwa kondisi geografis dan demografis merupakan salah satu faktor disparitas antar wilayah. Disparitas yang terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan konsentrasi penduduk pada suatu daerah tertentu dan hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas regional dalam pertumbuhan output dan kesempatan kerja.

Selanjutnya, faktor ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan adalah investasi swasta dan pengeluaran pemerintah. Investasi swasta biasanya dialokasikan pada sektor ekonomi yang memberikan hasil investasi (rate of return) yang tinggi. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembangunan dialokasikan untuk pembangunan prasarana (inprastruktur) dan sarana (suprastruktur), yang bertujuan untuk pembentukan modal masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Pada sisi lain, Chenery (dalam Todaro, 1997) memandang bahwa pertumbuhan yang terus menerus dalam proses pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya sumbangan sektor industri dan jasa serta menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan nasional. Ini menunjukkan bahwa semakin besar sumbangan (share) sektor industri dan jasa perekonomian tersebut semakin maju.

### **Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah**

Ketimpangan regional menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar daerah. Apabila pangsa golongan pendapatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibagi atas pendapatan tinggi, menengah dan rendah, maka terlihat gambaran bahwa sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto justru hanya dimiliki oleh sejumlah kecil masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sementara itu sebagian besar masyarakat dengan penghasilan rendah hanya dapat menikmati sebagian kecil saja dari Produk Domestik Regional Bruto.

Menurut Todaro (1997) bagian pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan tinggi jauh lebih besar. Disamping itu diperkuat pula oleh laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Proses ini telah menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pertumbuhan ekonomi golongan penduduk berpendapatan rendah jauh di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai masyarakat ini berarti pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh semua golongan.

Mengingat bagian pendapatan yang diterima penduduk berpendapatan tinggi telah cukup besar, maka betapapun kecil laju

pertumbuhan ekonominya kenaikan pendapatan yang diterima golongan ini masih tetap lebih besar dibandingkan dengan golongan penduduk berpendapatan rendah. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi golongan penduduk berpendapatan rendah telah mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk berpendapatan tinggi, namun tambahan pendapatan yang diterima masih tetap lebih kecil. Hal ini terjadi sebagai akibat rendahnya basis pendapatan yang masih diterima golongan penduduk berpendapatan rendah dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan tinggi. Penurunan disparitas pertambahan pendapatan tersebut, sebenarnya dapat terjadi dengan mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### **Pola Pembagian Pendapatan**

Pola pembagian pendapatan yang lebih merata lebih mampu berperan selaku indikator tingkat kemakmuran penduduk. Sebaliknya pola pembagian pendapatan yang merata tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih tepat disebut pemerataan kemiskinan dibandingkan dengan pemerataan kemakmuran.

Dengan demikian, baik faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun pola pembagian pendapatan yang semakin merata, diperlukan sekali di dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun demikian, Sumitro Djodjohadikusumo (1994) tetap berpandangan agar pembangunan lebih banyak menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengingat bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bahkan jika laju pertumbuhan ekonomi hanya sama dengan pertambahan penduduk maka dalam keadaan serupa akan terjadi kemacetan atau stagnasi ekonomi.

Kebijaksanaan pemerataan hasil-hasil pembangunan ini tidaklah mudah. Dalam hal ini, Kuznets (dalam Todaro, 1997) telah mencari hubungan antara pembagian pendapatan relatif dengan tingkat pendapatan per kapita. Kuznets melihat terdapat perubahan ketimpangan pola pembagian pendapatan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Dalam tahap-tahap awal pembangunan, ketimpangan pola pembagian pendapatan akan semakin meningkat dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Keadaan yang demikian ini disebut sebagai trade off antara ketimpangan pola pembagian pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Nilai gini Rasio berkisar antara nol dan satu. Bila nilai Gini Rasio sama dengan 0 maka

distribusi pendapatan merata sekali, karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna. Bila Rasio Gini sama dengan satu diartikan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya semakin tinggi Nilai Rasio Gini semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya semakin rendah nilai Rasio Gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Disamping menggunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia, untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar daerah, dikenal juga beberapa alat analisis seperti inverted U curve dari Kuznet, Entrophy Index Theil, serta Indeks Ketimpangan Regional Williamson.

### **Studi Empiris Sebelumnya.**

Simon Kuznet (1955) (dalam Mudrajat Kuncoro, 1997) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (Inverted U curve) bahwa ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan makin merata.

Williamson (dalam Susanti, dkk, 1995) menggunakan model yang menunjukkan indeks variasi pendapatan antar wilayah di dalam suatu negara yang disebut dengan Koefisien Variasi ( $V_w$ ). Model tersebut bila diterapkan untuk tingkat nasional akan menjadi suatu koefisien variasi tertimbang yang merupakan ukuran penyebaran tingkat pendapatan per kapita antar daerah relatif terhadap rata-rata nasional dimana tanpa deviasi daerah dibobot sumbangannya dengan penduduk secara nasional. Index Williamson berkisar antara 0 – 1. Semakin mendekati 0, ketimpangan distribusi pendapatan semakin rendah, sebaliknya bila semakin mendekati 1 berarti ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi.

Uppal dan Handoko (1986) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah yaitu sumbangan sektor primer, sekunder, dan tersier (disingkat Sh), investasi (I), transfer pemerintah pusat untuk propinsi (Tr), pengeluaran pemerintah pusat untuk propinsi (Ge), pertumbuhan dan kepadatan penduduk (P G dan D), nilai tambah per tenaga kerja disektor inudstri kecil menengah (TK), dan proporsi kelompok anak usia sekolah dasar-menengah (CE). Studi yang dilakukan dengan data runtut waktu tahun 1975-1980 tersebut mengemukakan bahwa seluruh faktor yang diidentifikasi memiliki hubungan yang signifikan khususnya komposisi sumbangan sektor, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja serta investasi, serta faktor yang cenderung

menurunkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah adalah pengeluaran pembangunan pemerintah pusat untuk propinsi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut: Seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Purbalingga dan Bagaimanakah pengaruh penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, dan pengeluaran pembangunan terhadap perubahan pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Purbalingga dan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, dan pengeluaran pembangunan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga

### **Hipotesis**

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Purbalingga termasuk kategori ketimpangan ringan
2. Perubahan jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga

## **METODE ANALISIS**

### **1. Metode Yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan fenomena masalah yang ada melalui pengumpulan data sekunder dari variabel-variabel yang digunakan secara runtut waktu (*time series*).

### **2. Operasionalisasi Variabel**

- a. Pendapatan per kapita  
Pendapatan per kapita adalah perbandingan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan rupiah.
- b. Penduduk  
Penduduk adalah komponen sumberdaya strategis yang ada di suatu daerah, mencakup tenaga kerja, dihitung pada pertengahan tahun tertentu, dinyatakan dalam satuan orang.
- c. Sumbangan sektor  
Sumbangan sektor adalah sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB dalam waktu satu tahun, dinyatakan

dalam satuan persen. Dalam penelitian ini, sumbangan sektor dibagi menjadi tiga yaitu sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian), sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan), dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa)

d. **Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan adalah seluruh mengeluarkan pemerintah yang dialokasikan pada sektor-sektor pembangunan tertentu, baik untuk pembangunan prasarana (inprastruktur) maupun sarana (suprastruktur), yang ditujukan untuk pembentukan modal masyarakat, dinyatakan dalam satuan rupiah.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan jenis data yang disesuaikan dengan pendekatan analisis yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Periode pengukurannya menggunakan data runtut waktu (*time series*) selama 14 tahun yaitu dari tahun 1990-2003. Sumber data dan informasi yang diperlukan bersifat data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi dan dokumen tertulis dari instansi dan lembaga yang terkait, diantaranya: Biro Perekonomian Pemda, Bappeda Kabupaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten.

### 4. Metode Analisis

a. Untuk mendeskripsikan secara kuantitatif ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Purbalingga dihitung dengan menggunakan Indeks Williamsons (Susanti, dkk, 1995):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 p_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

$V_w$  = Koefisien variasi /ketimpangan Williamson

$Y_i$  = Pendapatan per kapita kabupaten i (Purbalingga)

$Y$  = Pendapatan per kapita propinsi

$P_i$  = Penduduk pertengahan tahun kabupaten i (Purbalingga)

$n$  = Penduduk pertengahan tahun propinsi

Kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut:

Jika  $0,1 < V_w < 0,35$ , maka tingkat ketimpangan termasuk ringan

Jika  $0,35 < V_w < 0,5$ , maka tingkat ketimpangan termasuk sedang

$V_w > 0,5$ , maka ketimpangan termasuk berat

b. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, serta pengeluaran pembangunan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga, digunakan model estimasi regresi linier berganda. Hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam model fungsional sebagai berikut:

$$Y_{kap} = f(P_{ddk}, SSp, SSs, SSt, PP_{t-1})$$

Keterangan:

$Y_{kap}$  = Pendapatan per kapita kabupaten

$P_{ddk}$  = Jumlah penduduk kabupaten

$SSp$  = Sumbangan sektor primer dalam PDRB kabupaten

$SSs$  = Sumbangan sektor sekunder dalam PDRB kabupaten

$SSt$  = Sumbangan sektor tersier dalam PDRB kabupaten

$PP$  = Pengeluaran pembangunan kabupaten

$t-1$  = tenggang waktu (time lag)

Untuk estimasi, model fungsional di atas dimodifikasi dalam bentuk logaritma natural, untuk dapat langsung mengetahui elastisitas pendapatan per kapita terhadap elastisitas penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, serta pengeluaran pembangunan, sehingga model statistiknya menjadi sebagai berikut:

$$\ln Y_{kap} = \beta_0 + \beta_1 \ln P_{ddk} + \beta_2 \ln SSp + \beta_3 \ln SSs + \beta_4 \ln SSt + \beta_5 \ln PP_{t-1} + e_t$$

Keterangan:

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = elastisitas pendapatan per kapita terhadap jumlah penduduk ( $P_{ddk}$ )

$\beta_2$  = elastisitas pendapatan per kapita terhadap sumbangan sektor primer ( $SSp$ )

$\beta_3$  = elastisitas pendapatan per kapita terhadap sumbangan sektor sekunder ( $SSs$ )

$\beta_4$  = elastisitas pendapatan per kapita terhadap sumbangan sektor tersier ( $SSt$ )

$\beta_5$  = elastisitas pendapatan per kapita terhadap pengeluaran pembangunan ( $PP$ )

$e_t$  = faktor pengganggu (error term)

Untuk menaksir koefisien regresi dari model yang diuji, maka proses estimasi parameter dilakukan dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Dengan mempertimbangkan kelenturan (fleksibilitas), kecepatan, dan ketepatan (akurasi), estimasi parameter dihitung dengan menggunakan program komputer (SPSS versi 10).

### Pengujian Statistik

- a. Untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing koefisien regresi dengan tingkat keyakinan (*level of significance*) 95% atau  $\alpha = 5\%$  dilakukan melalui uji t dengan rumus (Sritua Arif, 1993):

$$t = \frac{\beta_n}{s\beta_n}$$

Dimana:

$\beta_n$  = Koefisien regresi masing-masing variabel

$s\beta_n$  = Standar error masing-masing variabel

Hipotesis statistik :

$H_0 : \beta_i = 0$ , variabel bebas yang diestimasi secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat

$H_1 : \beta_i \neq 0$ , variabel bebas yang diestimasi secara parsial mempengaruhi variabel terikat

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

Bila nilai t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (signifikan), artinya variabel bebas yang diestimasi secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

- b. Selain pengujian secara parsial (uji-t) juga dilakukan pengujian secara serentak melalui uji F (F-test) pada tingkat keyakinan (*level of significance*) 95% atau  $\alpha = 5\%$ , dengan rumus (Sritua Arief, 1993):

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)}$$

Dimana: n = Banyak observasi

k = Jumlah parameter

Hipotesis statistik:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$ , variabel bebas yang diestimasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$ , variabel bebas yang diestimasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

Bila F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (signifikan), artinya variabel bebas yang diestimasi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

- c. Pengujian berikutnya adalah pengukuran goodness of fit ( $R^2$ ) atau besaran koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model khususnya variabel bebas (*independent variable*) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) terletak antara 0 dan

1. Semakin tinggi nilai  $R^2$  semakin baik model tersebut.

- d. Untuk memperoleh penaksir yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*) atau penaksir terbaik linear yang tidak bias, pada metode ini dilakukan deteksi terhadap ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik (Sritua Arief, 1993 dan Gujarati, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Tingkat Ketimpangan

Perhitungan nilai Indeks Williamson Kabupaten Purbalingga selama periode penelitian (1990-2003) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,1. Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga termasuk kategori ringan. Walaupun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga masih relatif kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah, tetapi pertumbuhan yang terjadi disertai dengan pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pengelolaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan lebih baik. Kemampuan pemerintah di daerah dapat diimplementasikan dalam hal penciptaan pertumbuhan ekonomi yang bersesuaian dengan pemerataan pendapatan.

### 2. Analisis Regresi

Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural (Ln) sehingga penelitian ini sekaligus mengkaji elastisitas pendapatan per kapita terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, serta pengeluaran pembangunan dengan menggunakan persamaan regresi yang sudah diuji validitasnya. Perhitungan regresi linier berganda, setelah lolos dari berbagai uji asumsi klasik) dengan software SPSS versi 10 menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln } Y = & -166,440 + 4,809\text{Ln}X_1 + 12,007\text{Ln}X_2 + \\ & (-2.873) \quad (2.833) \quad (3.126) \\ & 4,511\text{Ln}X_3 + 15,273\text{Ln}X_4 - 2.46\text{E-}03\text{Ln}X_5 \\ & (3.251) \quad (3.291) \quad (-0.074) \end{aligned}$$

Keterangan: ( ) = nilai t hitung

Dari hasil perhitungan di atas, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ ), diketahui bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sumbangan sektor sekunder, dan sumbangan sektor tersier berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga, sedangkan variabel

pengeluaran pembangunan berpengaruh secara tidak signifikan.

Dengan menganggap variabel yang lain tetap, untuk memahami pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka hasil perhitungan statistik diatas dapat dimaknai sebagai berikut: Perubahan jumlah penduduk sebesar 1% mengakibatkan perubahan pendapatan per kapita sebesar 4.809%, Perubahan sumbangan sektor primer sebesar 1% mengakibatkan perubahan pendapatan per kapita sebesar 12.007%. Perubahan sumbangan sektor sekunder sebesar 1% mengakibatkan perubahan pendapatan per kapita sebesar 4.511%. Perubahan sumbangan sektor tersier sebesar 1% mengakibatkan perubahan pendapatan per kapita sebesar 15.273%. Karena perhitungan regresi di atas menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari masing-masing variabel, maka nilai koefisien regresi yang diperoleh sekaligus menunjukkan nilai elastisitas masing-masing variabel dalam mempengaruhi perubahan pendapatan per kapita. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas yang signifikan bersifat elastis dalam mempengaruhi pendapatan per kapita yang terlihat dari nilai koefisiennya yang bernilai lebih besar dari satu. Hal ini berarti bahwa peningkatan yang relatif kecil dalam faktor penduduk, sumbangan sektor primer, sekunder dan tersier akan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan per kapita.

Koefisien regresi yang sekaligus menunjukkan elastisitas dari masing-masing variabel bebas tersebut juga dapat menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Apabila dibandingkan dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas, maka terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel sumbangan sektor tersier adalah yang terbesar (15.273) sehingga bisa dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang paling besar terhadap perubahan pendapatan per kapita.

Apabila Diperhatikan kondisi yang terjadi di atas, terlihat bahwa sumbangan sektor, terutama sektor primer dan tersier, berperan cukup besar dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga. Demikian pula dengan penduduk. Jumlah penduduk juga berpengaruh nyata terhadap pendapatan per kapita. Jumlah penduduk ini dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi apabila mereka memang relatif produktif sehingga dapat menciptakan pasar, melalui meningkatnya permintaan, bagi barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut sehingga pada akhirnya mampu mendorong peningkatan *output* dalam perekonomian daerah. Walaupun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk ini pun perlu benar-benar diperhatikan jangan sampai pertumbuhan penduduk melebihi

pertumbuhan *output* yang tercermin dari nilai PDRB.

Apabila pertumbuhan penduduk lebih besar daripada pertumbuhan PDRB maka pendapatan per kapita akan menurun sedangkan apabila pertumbuhan penduduk lebih kecil daripada pertumbuhan PDRB, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Oleh karena itu, perlu juga suatu upaya untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan penduduk dan upaya untuk meningkatkan produktifitas penduduk yang sudah ada agar benar-benar menjadi modal sumberdaya manusia yang berkualitas yang dapat menjadi modal pendorong pembangunan yang dilaksanakan. Selama periode penelitian, rata-rata pertumbuhan penduduk yang terjadi di Purbalingga sebesar 0.96% per tahun relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonominya yang mencapai 3.30% per tahun.

Pengeluaran pembangunan belum secara nyata mempengaruhi perubahan pendapatan per kapita, hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa pengeluaran pembangunan tersebut belum cukup mendorong produktivitas kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Purbalingga.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 1990-2003 termasuk dalam kategori ketimpangan yang ringan.
  2. Perubahan pendapatan per kapita di Kabupaten Purbalingga secara nyata dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah penduduk, sumbangan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Pengaruh terbesar ditentukan oleh sumbangan sektor tersier.
- Implikasi dari penelitian ini adalah;
1. Program pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menuntut upaya aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk itu, dengan mengacu pada kondisi dan potensi Kabupaten Purbalingga, maka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang ada sehingga faktor-faktor tersebut menjadi basis prioritas perencanaan pembangunan daerah untuk proses pembangunan selanjutnya.
  2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk terus dipacu dalam rangka menjaga konsistensi hasil

pembangunan yang bersesuaian dengan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pengembangan sektor unggulan yang dapat menjadi *leading sector* perlu diperhatikan secara lebih mendalam, dengan mengetahui secara lebih detail sampai kepada komoditas unggulan dari sektor tersebut sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat menjadi dasar juga untuk efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran pengeluaran pembangunan yang ekspansif dan produktif terutama dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja guna mendorong peningkatan produktivitas penduduk sehingga dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anoniji. *Purbalingga Dalam Angka*. beberapa terbitan. Badan Pusat Statistik. Purbalingga
- Amstrong, Harvey and Taylor, Jim. 1997. *Regional Economics and Policy*. Harvester Publisher. 2<sup>nd</sup> Edition. New York
- Glasson, John. 1977 (terjemahan Paul Sitohang). *Pengantar Perencanaan Regional*. LPFE-UI. Jakarta
- Gujarati. N.D. 1999. (alih bahasa Sumarno Zain). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Cetakan Keenam. Jakarta
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. 1995. *Indikator Makroekonomi*. LDFE-UI. Jakarta
- Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE-UGM. Yogyakarta
- Mawardi I. 1997. Daya Saing Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Prisma 08*. hal. 51-61.
- Mudrajat Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. YKPN. Yogyakarta
- Myrdal, G. 1957. *Economic Theory and Underdevelopment Regions*. London
- Sritua Arief. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UI Press. Jakarta
- Suahasil Nazara. 1994. Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia: Suatu Aplikasi Fungsi Agregat Indonesia 1985-1991. *Prisma 08*. hal 19-36
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta
- Todaro, Michael P. 1997. *Economic Development*. Longman Publisher. 6<sup>th</sup> Edition London
- Uppal, J.S. and Budiono Sri Handoko. 1986. Regional Income Disparities in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol. XXXIV. No. 3.